

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Setiap agama memiliki tempat beribadatnya masing-masing. Masjid adalah tempat ibadah atau bangunan yang didirikan untuk melaksanakan ibadah umat Islam terutama sebagai tempat berlangsungnya shalat berjamaah. Buku Tipologi Masjid yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan, masjid juga dikenal sebagai langgar yakni sebuah tempat ibadah di lingkungan masyarakat yang dibangun untuk kebutuhan rohaniah (shalat) dengan jumlah jamaah lebih sedikit dari masjid. Langgar umumnya dibangun oleh tokoh agama ataupun ustad, bukan hanya diperuntukkan untuk ibadah, namun langgar juga sebagai tempat mencari ilmu. Mushola, ialah istilah lain dari masjid juga yaitu tempat ibadah yang terletak pada tempat-tempat tertentu seperti mal, kantor, dan ruang publik lainnya. Setiap masjid umumnya memiliki Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yakni suatu wadah organisasi umat Islam untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas masjid. Masjid yang memiliki anggota DKM tersebut umumnya dibagi menjadi tiga bidang yakni Bidang ‘Idarah, ‘Imarah, dan Ri’ayah. Bidang ‘Idarah berfokus pada administrasi manajemen masjid, bidang ‘Imarah mengelola kegiatan atau aktivitas kemakmuran masjid, sedangkan bidang Ri’ayah bertugas dalam pemeliharaan fisik masjid.

Indonesia menempati peringkat pertama negara muslim terbesar di dunia, umat Islam di Indonesia berjumlah 222 juta yang berarti lebih dari 87% jumlah masyarakat beragama Islam (Anonim, 2019). Selaras dengan persentase tersebut, data dari Dewan Masjid Indonesia menunjukkan bahwa rumah ibadah umat muslim pun cukup banyak dengan jumlah 800 ribu (Anonim, 2019). Bertujuan dalam pendataan awal, Kementerian Agama Republik Indonesia telah meluncurkan Situs Sistem Informasi Masjid (SIMAS) dan terdapat 258.519 masjid telah terdaftar di situs ini mulai dari Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Bersejarah, Masjid Jami, Masjid Raya, dan Masjid yang berada di Tempat Publik (Anonim, 2019).

Sebuah situs survei menilai bahwa provinsi yang paling banyak jumlah masjidnya ialah Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk empat kali dari jumlah penduduk DKI Jakarta, wajar jika Jawa Barat menempati peringkat pertama dan memiliki 147 ribu masjid (Anonim, 2019). Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 menyatakan bahwa semakin banyak masjid semakin baik wilayah tersebut (Hasan, 2017). Pernyataan ini diutarakan karena masjid dinilai dapat menyebarkan banyak ilmu positif, bukan hanya ilmu pendidikan agama saja namun pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan moral. Melanjutkan perkataan gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat Periode 2018-2023 menerapkan beberapa program untuk meningkatkan mutu pendidikan keagamaan diantaranya program pendidikan untuk ulama ke luar negeri, minimal satu orang hafidz quran dalam satu desa, pemberdayaan lingkungan keagamaan khususnya pesantren, dan gerakan maghrib mengaji. Program-program ini akan disosialisasikan ke setiap Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam meningkatkan kepribadian agama masyarakat (Ramdhani, 2018).

Gubernur Jawa Barat memiliki opsi pemindahan ibukota diluar Kota Bandung yang sekarang menjadi pusat kota. Kecamatan Bojongsoang khususnya Desa Tegalluar ialah satu dari tiga opsi wilayah yang rencananya menjadi ibukota baru Provinsi Jawa Barat. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi yang besar dalam pengembangan daerahnya dan memiliki letak geografis yang tidak jauh dari Kota Bandung menjadi alasan Kecamatan Bojongsoang dilirik pemerintah (Aida, 2019). Dalam mempersiapkan opsi pemindahan ibukota ini, Kecamatan Bojongsoang gencar dalam melaksanakan visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat salah satunya meningkatkan peran serta masjid (Anonim, 2017). Tercatat ada 90 masjid yang tersebar di desa-desa pada Kecamatan Bojongsoang, berikut rinciannya:

Tabel 1. 1

Jumlah Masjid yang Tersebar di Kecamatan Bojongsoang

No.	Desa	Jumlah Masjid
1.	Bojongsari	14
2.	Bojongsoang	16
3.	Buah Batu	13
4.	Cipagalo	19
5.	Lengkong	11
6.	Tegalluar	17
Total		90

Sumber: Kementerian Agama (2019)

Secara administratif, Kecamatan Bojongsoang dibatasi oleh Kecamatan Buah Batu Kota Bandung di bagian utara, Kecamatan Dayeuhkolot di bagian barat, bagian timur dibatasi oleh Kecamatan Cileunyi dan Kecamatan Rancaekek, sedangkan pada bagian selatan ialah Kecamatan Baleendah dan Kecamatan Ciparay. Peralihan fungsi lahan menjadi pemukiman di Kecamatan Bojongsoang sejalan dengan pembangunan masjid yang semakin pesat. Bukan hanya perkembangan masjid saja yang pesat, namun adanya kesadaran pembuatan laporan keuangan oleh anggota DKM sudah menjadi permulaan yang baik. Masyarakat juga mulai sadar akan adanya laporan keuangan masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus masjid kepada masyarakat sebagai pemilik ruang publik tersebut. Observasi awal menyebutkan, satu dari sepuluh masjid belum memiliki salah satu laporan keuangan, namun sembilan masjid lainnya setidaknya memiliki satu atau dua laporan keuangan. Hal ini ditarik garis besar bahwa 90 persen masjid pada Kecamatan Bojongsoang mulai sadar akan pembuatan laporan keuangan masjid. Namun keberadaan laporan keuangan saja tidaklah cukup, laporan keuangan ini harus menghasilkan informasi yang berkualitas. Hal ini yang akan diteliti lebih dalam dengan menggunakan cara survei kuesioner ke masjid di Kecamatan Bojongsoang yang terdaftar pada Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Republik Indonesia.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Kualitas informasi laporan keuangan harus memiliki karakter kualitatif yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan (IAI, 2009). Indikator pertama menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus dapat dipahami dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan. Relevan sebagai indikator kedua menjelaskan bahwa pembuatan laporan keuangan dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan pengelolaan masjid. Indikator ketiga ialah keandalan yang diartikan sebagai laporan keuangan dapat menggambarkan keseluruhan transaksi atau peristiwa yang seharusnya dengan jujur dan benar. Pembuatan laporan keuangan yang berkualitas harus dapat dibandingkan dari tahun ke tahun, hal ini mencakup indikator keempat. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba menurut ISAK 35 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2018). Laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto beserta informasi antara unsur-unsur tersebut. Laporan penghasilan komprehensif menyediakan informasi mengenai pendapatan dan beban yang dihasilkan. Laporan perubahan aset neto menyajikan perubahan jumlah aset neto pada periode tertentu. Penyajian informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu periode dicatat dalam laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan bertujuan sebagai penjelasan tambahan dari keempat laporan keuangan di atas.

ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba menjelaskan bahwa masjid sebagai tempat peribadatan wajib pula memiliki pertanggungjawaban dalam pengelolaan dananya. Ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba tak lepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut. Interpretasi ini dapat diterapkan juga oleh entitas berorientasi nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Perbedaan yang mendasar antara organisasi laba dan nonlaba terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau

manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikannya (IAI, 2018).

Organisasi nonlaba atau nirlaba memang tidak berorientasikan laba. Namun dalam setiap pelaksanaan kegiatannya harus tetap adanya bentuk pertanggungjawaban seperti organisasi laba yang memiliki laporan keuangan. Pencatatan yang jelas beserta pengungkapan yang benar atas seluruh kegiatan organisasi yang dilakukan perlu dilaksanakan. Pada organisasi nonlaba seperti masjid, pencatatan dan pengungkapan laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab dari tugas yang di amanahkan kepada pengurus atau pengelola masjid. Bentuk pertanggungjawaban ini bukan hanya untuk pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti jamaah dan donatur, namun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dengan itu Kementerian Agama Republik Indonesia membawahi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan sebuah pedoman dalam pembinaan manajemen masjid (Nomor DJ. II/802 Tahun 2014). Standar ini dibentuk untuk menjadi parameter dalam pengelolaan masjid. Pembahasan ini akan berfokus pada bidang Idarah yang bertugas dalam mengelola bagian administrasi dan manajemen karena sejalan dengan variabel dependen penelitian. Dalam pedoman ini dijelaskan bahwa administrasi masjid perlu adanya pencatatan dan pendokumentasian seluruh kegiatan yang sudah dan sedang dilakukan, dievaluasi, serta dikembangkan. Pengelolaan keuangan sendiri meliputi pengadaan dana, pembelanjaan dana yang tepat, dan pengelolaan keuangan yang baik. Pengadaan dana dari kegiatan pengumpulan dana seperti zakat, infaq, dan shodaqah harus dicatat dan didokumentasikan secara jelas (Kementerian Agama RI, 2014).

Provinsi Jawa Barat ialah provinsi yang memiliki populasi masjid terbanyak se-Indonesia. Maka dari itu, pemerintahan Jawa Barat sadar untuk mengedepankan nilai religius di setiap kegiatannya. Adapula misi pertama Provinsi Jawa Barat ialah membentuk manusia pancasila yang bertaqwa. Pemerintah percaya bahwa masjid dapat menjadi pusat peradaban dan pengembangan ilmu agama maupun ilmu lainnya. Pemerintah memopulerkan program masjid juara agar dapat

mengedepankan masyarakat Jawa Barat yang lebih baik. Semakin berkembangnya masjid, dinilai sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Salah satu program masjid juara ialah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas masjid. Hal tersebut dibuktikan dengan menghadirkan laporan keuangan masjid yang berkualitas. Keberadaan laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu tindakan tanggungjawab dari pengurus masjid ke publik maupun sikap amanah yang dijalankan pengurus masjid kepada Allah SWT. Laporan keuangan merupakan suatu proses akuntansi meliputi pencatatan dan pengkategorian data keuangan secara berulang. Pelaporan dan penganalisaan terhadap laporan keuangan biasanya dilakukan secara berkala pada rentang waktu tertentu. Laporan keuangan memiliki peran dalam pengambilan keputusan pengembangan masjid itu sendiri. Peran lain ialah adanya publikasi laporan keuangan dari pengurus masjid membuat masyarakat atau jamaah merasa lebih tenang dan percaya terhadap alokasi dana yang digunakan. Setelah Ta'mir masjid Jendral Sudirman Surabaya memberikan edaran rutin kepada jamaah atau masyarakat berisi laporan keuangan, penerimaan donatur mereka meningkat sekitar 30 persen. Hal ini membuktikan bahwa bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yang dapat diketahui oleh masyarakat luas akan membuat pola pikir masyarakat baik terhadap pengelolaan dana pada masjid tersebut (Aji, 2016).

Wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada salah satu masyarakat diketahui bahwa tahun 2014 sampai dengan saat ini perkembangan masjid di Kecamatan Bojongsoang berkembang sangat pesat sejalan dengan perkembangan pemukiman warganya. Perkembangan masjid dilihat bukan hanya dari fisik saja, namun pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya laporan keuangan masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban pun meningkat. Namun, kesadaran ini tidak sejalan dengan kualitas informasi laporan keuangan pada masjid yang dihasilkan. Anggota Bidang Pengembangan Masjid Yayasan Masjid Nusantara (YMN) mengungkapkan, Masjid Al-Mabrur di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang bertahun-tahun keadaan masjidnya kurang mumpuni dalam menampung banyaknya jamaah. Masjid ini dirasa sangat membutuhkan bantuan perbaikan. Banyaknya jamaah yang beribadah di masjid tersebut seharusnya sejalan dengan

tingkat kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan masjid. Tingkat kepercayaan dituangkan dengan perolehan dana masjid dari kotak amal yang diedarkan ke jamaah maupun sumbangan lainnya yang masih belum bisa menutup anggaran perbaikan masjid. Hal tersebut disebabkan karena adanya laporan keuangan masjid yang kurang mumpuni. Oleh karena itu, YMN mengarahkan untuk membuat proposal pengajuan dana serta melampirkan laporan keuangan masjid agar dapat meyakinkan umat dan donatur atas tujuan yang ingin dicapai (Azha, 2014). Proposal ini juga bisa diedarkan ke masyarakat maupun dikirimkan ke masjid-masjid terdekat pada Kecamatan Bojongsoang seperti Desa Cipagalo yang mayoritas masjidnya memiliki saldo berlebih. Masjid yang berorientasi tidak memupuk laba akan secara sukarela menyerahkan sebagai hartanya untuk kepentingan umat. Pada akhirnya, pengurus Masjid Al-Mabrur membuat dan menyerahkan kepada YMN. Setelah mendapatkan proposal tersebut, YMN memberikan sumbangan dana untuk perbaikan Masjid Al-Mabrur. Sumber daya yang kompeten dalam hal ini ialah pengurus masjid, dinilai dapat melahirkan kemakmuran pada masjid tersebut. Pembuatan laporan keuangan masjid yang berkualitas dapat menjadi patokan kepercayaan donatur atau pemangku kepentingan lainnya seperti jamaah dalam pengelolaan masjid.

Tolak ukur kemakmuran masjid juga bukan pada banyaknya saldo masjid, pernyataan ini dibuktikan Masjid Jogokariyan di Yogyakarta yang hampir tidak memiliki saldo pada setiap akhir bulannya atau bersaldo nol (Muchlisin, 2019). Bermula dari seorang jamaah yang berbaring lemas di dalam masjid selepas menunaikan ibadah shalat. Beliau dibawa ke rumah sakit dan ternyata dokter menyatakan Beliau harus menjalani operasi. Ketua DKM masjid tersebut dengan sigap menanyakan jumlah saldo masjid kepada bendahara, kemudian menyerahkan seluruh dana masjid untuk pengobatan Beliau karena mengetahui Beliau adalah warga sekitar masjid yang kurang mampu. Setelah itu, ketua DKM masjid mengumumkan dana yang dialokasikan ke pengobatan salah seorang bapak yang tinggal dekat masjid. Mendengar pengumuman tersebut, tak disangka masyarakat merespon positif dan setiap bulannya saldo Masjid Jogokariyan semakin bertambah. DKM Masjid Jogokariyan merasa ini adalah tanggungjawab yang harus

diemban yaitu menyalurkannya kembali untuk operasional masjid hingga kesejahteraan masyarakat di sekitar masjid. Bahkan, masjid mampu memfasilitasi *Wi-Fi* gratis, ruang olahraga untuk anak dan dewasa, hingga menyediakan bukaan puasa sejumlah 5.000 piring setiap hari selama Bulan Ramadhan (Ahyar, 2019). Ustad Jazil selaku salah satu pengurus Masjid Jogokariyan berpandangan bahwa banyak pengurus masjid yang senang menerima amanah (sumbangan) namun tidak bisa bertanggungjawab (Muhyiddin, 2019). Beliau juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai sosok yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial masyarakat kaum muslimin di Yogyakarta dan menjadikan Masjid Jogokariyan sebagai masjid percontohan karena melahirkan ide-ide inovatif dalam gerakan sosial kemasyarakatan. Berawal dari hal yang sederhana, dapat membuahkan hasil yang besar untuk masyarakat.

Mendengar hal tersebut diketahui fungsi masjid bukan sekadar tempat beribadah saja, namun dapat menjadi tempat menuntut ilmu. Masjid juga dapat digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Banyak aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di masjid yang dapat mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Setiap kegiatan pasti berkaitan dengan pendanaan, baik dana masuk maupun dana keluar. Pencatatan setiap transaksi sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya kesalahan, baik pencatatan hingga kecurangan. Masyarakat tidak memaksakan adanya bentuk pertanggungjawaban masjid seperti laporan keuangan, namun alangkah baiknya setiap organisasi memiliki bentuk pertanggungjawaban itu untuk pemangku kepentingan seperti masyarakat.

Pembuatan laporan keuangan membutuhkan beberapa hal yang harus diperhatikan karena dapat menjadi faktor dalam memengaruhi kualitas informasinya. Praktik manajemen keuangan, sistem pengendalian internal, kegiatan pengumpulan dana, kompetensi sumber daya, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi variabel independen yang dipilih peneliti untuk diteliti lebih jauh tentang keberpengaruhannya terhadap kualitas informasi laporan keuangan masjid yang dihasilkan. Variabel independen kegiatan pengumpulan dana dan praktik manajemen keuangan dinilai sejalan peranannya dalam memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan (Jazeel, 2014). Maka dari itu, kedua variabel ini

diambil untuk diteliti lebih lanjut. Dalam beberapa penelitian variabel independen yakni sistem pengendalian internal dapat memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Variabel independen ini akan kembali digunakan dalam penelitian dengan objek penelitian yakni masjid di Kecamatan Bojongsoang. Kompetensi sumber daya dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen lainnya tidak menghasilkan kesimpulan yang konsisten pada beberapa penelitian, maka dari itu peneliti akan mengkaji kembali kedua variabel independen ini.

Manajemen keuangan ialah keseluruhan aktivitas organisasi yang berhubungan dengan usaha dalam mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin (Riyanto, 2005; dalam Syaifuddin, 2016). Praktik manajemen keuangan menentukan kualitas dan kuantitas penyedia layanan (Sulaiman, 2008; dalam Jazeel, 2014). Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan pada masjid dilihat dari praktiknya. Tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan dinilai dari perencanaan sumber dana dan penyaluran sumber dana. Manajemen keuangan yang baik ialah dapat mengatur kedua hal tersebut secara seimbang. Indikator praktik manajemen keuangan yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan masjid ialah penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan, dan pembuatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Charolina & Abdullah, 2013). Pada awalnya, manajemen keuangan tumbuh dan berkembang dikalangan dunia bisnis, industri, bahkan militer akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya manajemen keuangan sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan dalam berbagai usaha maupun kegiatan termasuk didalamnya organisasi nonlaba seperti pengelolaan masjid (Laeli, 2017). Penelitian Charolina & Abdullah (2013) dan Jazeel (2014) menyimpulkan bahwa praktik manajemen keuangan sebagai variabel independen berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Faktor kedua yang memengaruhi kualitas laporan keuangan yakni sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal berfungsi untuk mengamankan kekayaan atau aset, menguji ketepatan sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, menggalakan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan

pimpinan (Tuannakotta, 1982; dalam Rosdiani, 2011). Hal ini dinilai berpengaruh karena sistem pengendalian internal merupakan suatu bentuk pengawasan atau kontrol dari sebuah pencapaian tujuan. Sistem pengendalian internal yang kurang baik akan menimbulkan suatu kecurangan atau gagalnya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Adapun indikator sistem pengendalian internal yakni lingkungan pengendalian dari sudut pandang pembagian, lingkungan pengendalian organisasi, kegiatan pengendalian, komunikasi, dan pemantauan pembukuan akuntansi (Laeli, 2017). Menurut Andriani (2011), masjid yang berukuran besar memiliki kualitas sistem pengendalian internal yang lebih baik dari masjid yang berukuran kecil. Sejalan dengan sistem pengendalian internalnya, jika hal tersebut dinilai baik akan berdampak kepada kualitas informasi laporan keuangan masjid yang baik pula. Lima penelitian mengungkapkan bahwa variabel independen ini dinilai berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yakni penelitian Isviandari *et al.* (2019), Surastiani & Handayani (2015), Herawati (2014), Kasim (2015), dan Anwar & Mukadarul (2016).

Kegiatan pengumpulan dana menjadi faktor ketiga atas kualitas informasi laporan keuangan. Kegiatan pengumpulan dana dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas dalam menghimpun dana untuk keperluan tertentu. Hal utama yang diperlukan dan diperhatikan dalam mengatur dana ialah memahami jelas fungsi dana yang dimiliki, disimpan, dan diinvestasikan (Syaiquddin, 2016). Indikator variabel kegiatan pengumpulan dana yakni relasi organisasi, peran aktif pengurus masjid, kepercayaan masyarakat, dan pencatatan masuk keluarnya dana (Syaiquddin, 2016). Pengurus masjid melakukan kegiatan ini untuk perkembangan masjid kedepannya. Dana yang dikumpulkan, digunakan untuk keperluan perawatan fisik masjid sampai digunakan dalam kegiatan keagamaan. Pengumpulan dana ini bersifat sukarela seperti penerimaan zakat, infaq, shodaqoh, dan sumbangan lainnya. Penggunaan dana yang efektif dan efisien pada praktik manajemen keuangan, dinilai sejalan dengan kegiatan pengumpulan dana. Penelitian Jazeel (2014) mengungkapkan variabel independen kegiatan pengumpulan dana memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan sebagai variabel dependennya.

Selanjutnya, ada dua faktor tambahan yang akan dikaji kembali yakni kompetensi sumber daya dan pemanfaatan teknologi informasi. Kompetensi sebagai kemampuan manusia untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan ditempatnya bekerja. Manusia mampu untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan dalam sebuah situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati (Andini dan Yusrawati, 2015; dalam Apriliani, 2017). Adapun indikator kompetensi sumber daya ialah pengetahuan, latar belakang pendidikan akuntansi, keterampilan, dan pengalaman (Isviandari *et al.*, 2019). Peran serta pengurus masjid dirasa penting menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengurus masjid menjadi kunci kemakmuran masjid maupun umat. Penelitian Isviandari *et al.* (2019), Surastiani & Handayani (2015), Setyowati (2014), Kasim (2015), dan Anwar & Mukadarul (2016) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan masjid. Sebaliknya, penelitian Muda *et al.* (2017) dan Sagara (2015) kompetensi sumber daya tidak memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan.

Era perkembangan teknologi yang pesat, seluruh organisasi didorong untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mendapatkan, menyusun, memproses, dan menyimpan data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun pemerintah dalam pengambilan keputusan (Utama, 2017). Indikator dalam variabel ini dirangkum menjadi empat yakni kesadaran teknologi informasi, penggunaan komputer, penggunaan alat hitung, dan media (Laeli, 2017). Pemanfaatan teknologi informasi dinilai dapat membantu pekerjaan individu dan mengurangi kesalahan perorangan, hal tersebut dicerminkan untuk menghasilkan laporan keuangan masjid yang berkualitas. Penelitian Anwar & Mukadarul (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh dalam melahirkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun, penelitian Surastiani & Handayani (2015) dan Muda *et al.* (2017) menyatakan sebaliknya. Masih menuai perbedaan hasil penelitian, peneliti akan mengkaji kembali variabel independen kompetensi sumber daya dan pemanfaatan teknologi informasi akankah

berpengaruh atau tidak terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada masjid di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2020.

Latar belakang yang dijabarkan di atas, menjelaskan bahwa wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki masjid atau tempat ibadah umat muslim terbanyak di Indonesia dinilai dapat memberikan efek positif terhadap perkembangan wilayahnya. Hal ini didukung dengan wacana pemindahan ibukota Provinsi Jawa Barat serta kepedulian pengurus masjid terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penilaian ini dilihat dari sudut pandang bidang akuntansi khususnya akuntansi syariah. Objek penelitian sebelumnya yang berbeda yakni pada wilayah Semarang, Yogyakarta dan Malang menginspirasi peneliti untuk kembali mengulik topik tersebut di wilayah teritori yang belum pernah diteliti. Informasi laporan keuangan yang berkualitas pada masjid dapat membantu umat dalam mensejahterakan masyarakat dan wilayahnya. Menuju wilayah yang berdikari atas dasar informasi laporan keuangan yang berkualitas, banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengangkat judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Masjid di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2020)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pembahasan latar belakang di atas menjelaskan bahwa adanya edaran rutin berisi laporan keuangan masjid yang berkualitas, dipercaya dapat menunjukkan sikap amanah terhadap apa yang menjadi tanggungjawab pengurus masjid selaku pengelola. Observasi awal wilayah Kecamatan Bojongsoang, kepedulian akan adanya pencatatan dan pembukuan pada masjid mulai menjadi perhatian. Namun, laporan keuangan yang belum diketahui kualitasnya yang menjadi garis bawah permasalahan pada penelitian ini. Menurut beberapa penelitian sebelumnya, kualitas informasi laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni praktik manajemen keuangan, sistem pengendalian internal, kegiatan pengumpulan dana, kompetensi sumber daya, dan pemanfaatan teknologi informasi. Faktor-faktor

tersebut dirasa perlu diketahui pengurus masjid agar dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas bagi penggunanya yakni umat.

Masjid sebagai salah satu entitas nonlaba memang tidak mengharuskan adanya bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang kepentingan. Namun, entitas nonlaba seperti masjid yang mempunyai laporan keuangan dinilai telah melaksanakan tanggungjawab kepada umat, sesuai dengan aturan Kementerian Agama Republik Indonesia membawahi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan sebuah pedoman dalam pembinaan manajemen masjid (Nomor DJ. II/802 Tahun 2014). Standar ini dibentuk untuk menjadi parameter dalam mengelola masjid. Struktur laporan keuangan entitas nonlaba pun sudah diatur dalam ISAK 35 yang disahkan pada 1 Januari 2020 lalu. Informasi laporan keuangan yang berkualitas dapat dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, perbaikan fisik masjid, sampai dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar masjid. Peran pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan daerah bisa terlaksana dengan baik dengan bantuan organisasi nonlaba seperti DKM yang mumpuni.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bagaimana karakteristik responden pengurus masjid di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung Tahun 2020?
2. Bagaimana praktik manajemen keuangan, sistem pengendalian internal, kegiatan pengumpulan dana, kompetensi sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas informasi laporan keuangan?
3. Apakah praktik manajemen keuangan, sistem pengendalian internal, kegiatan pengumpulan dana, kompetensi sumber daya, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
4. Apakah praktik manajemen keuangan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
5. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?

6. Apakah kegiatan pengumpulan dana berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
7. Apakah kompetensi sumber daya berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
8. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirangkum berdasarkan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik responden pengurus masjid di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui praktik manajemen keuangan, sistem pengendalian internal, kegiatan pengumpulan dana, kompetensi sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas informasi laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh praktik manajemen keuangan, sistem pengendalian internal, kegiatan pengumpulan dana, kompetensi sumber daya, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh praktik manajemen keuangan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
6. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan pengumpulan dana terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
7. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
8. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat ini dikelompokkan kedalam dua aspek, yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

1.5.1.1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap topik kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran serta referensi dalam penelitian selanjutnya. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan juga dapat diperhatikan lebih lanjut.

1.5.2 Aspek Praktis

1.5.2.1 Bagi Dewan Kemakmuran Masjid

Dewan kemakmuran masjid diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan serta dapat memotivasi DKM tentang pentingnya informasi laporan keuangan yang berkualitas.

1.5.2.2 Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam penerapan salah satu misi pemerintah daerah yakni dalam meningkatkan peran serta masjid dengan memberikan gambaran terhadap laporan keuangan masjid yang berkualitas. Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan langkah selanjutnya terhadap pengurus masjid selaku pengelola dalam memakmurkan masjid, masyarakat, serta wilayahnya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam penulisan tugas akhir ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub bab. Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dengan ringkas dan padat pada isi penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka penelitian tentang teori pendukung untuk variabel yang akan diteliti. Variabel independen terdiri dari praktik manajemen keuangan, sistem pengendalian internal, kegiatan pengumpulan dana, kompetensi sumber daya, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, variabel dependen penelitian ini yakni kualitas informasi laporan keuangan. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai pendukung dan acuan penelitian, kerangka pemikiran membahas pola pikir untuk menggambarkan permasalahan yang akan dibahas, dan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Penjelasan berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi dan definisi variabel operasional, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan dalam bab ini, terdiri dari dua bagian yakni penyajian hasil analisis data dan penyajian pembahasan atau analisis dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penafsiran terhadap analisa temuan penelitian dan saran secara kongkrit. Adapun saran yang diberikan mampu memberikan kesadaran bagi peneliti selanjutnya, pengurus masjid, serta pemerintah daerah yang akan menggunakan penelitian ini untuk keberlangsungan pengelolaan keuangan masjid yang lebih baik.